BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait implementasi program kampung KB di Kelurahan Sidotopo, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Transmisi komunikasi diawali dengan pencanangan oleh Walikota Surabaya sebagai penunjukan Kampung KB pada tahun 2016, namun Surat Keputusan (SK) dari Camat Kecamatan Semampir baru dikeluarkan pada tanggal 2 Desember 2019. Adapun kejelasan komunikasi dilakukan dengan sosialisasi terkait tujuan Program KB dan sistem penyelenggaraannya, dimulai dari pembentukkan Kampung KB hingga pelatihan yang telah dilakukan kepada PKB atau kader dengan cara mendalami tentang KB dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Kemudian dalam hal konsistensi pada masyarakatnya konsisten dalam menggunakan KB jangka panjang guna mengatur jarak kehamilan dan membentuk keluarga kecil sejahtera.
2. Sumberdaya yang tersedia dalam penyelenggaraan Program Kampung KB di Kelurahan Sidotopo, terdapat 8 fungsi keluarga atau Tim Pokja (Kelompok Kerja) yang didalamnya terdapat Pembina, Ketua Pelaksana, Sekretaris, Bendahara, dan Kader yang nantinya membantu menyampaikan kepada masyarakat melalui sosialisasi dan mampu

mengelola kegiatan Program KB tersebut. Kemudian belum tersedianya pedoman perundang-undangan yang secara khusus diterapkan di Surabaya tentang penyelenggaraan Program Kampung KB ini. Adapun kewenangan para implementor belum dijalankan secara optimal, karena implementasi 8 fungsi keluarga ini ada beberapa yang belum maksimal seperti seksi kasih sayang dan seksi perlindungan. Dan apabila terdapat suatu kendala dari 8 fungsi keluarga tersebut akan diselesaikan secara musyawarah dengan Rapat Musyawarah Kelurahan dibawah kewenangan Lurah. Dan untuk fasilitas terdapat kendala dana untuk konsumsi masyarakat dalam mengadakan sosialisasi dan untuk ketersediaan fasilitas yang lain diperlukan adanya sumberdaya manusia dalam menjalankan program ini dan media pendukungnya adalah fasilitas dari PKB Kecamatan yang bekerjasama dengan pihak Puskesmas.

3. Disposisi atau sikap pelaksana Program Kampung KB selalu aktif memberikan penyuluhan kepada masyarakat, namun tergantung dari sikap masyarakatnya bisa menerima atau tidak dengan adanya program ini. Arahan dan tanggapan pelaksana dilakukan dengan baik dan sesuai pedoman. Sedangkan untuk intensitas respons atau tanggapan pelaksana telah dibuktikan dengan adanya sosialisasi guna untuk meningkatkan ketanggapan respons masyarakat untuk ber-KB dengan dibentuknya Rapat Musyawarah Kelurahan yang bertujuan untuk mewujudkan Program Kampung KB di Sidotopo ini.

4. Struktur birokrasi penyelenggaraan Program Kampung KB di Kelurahan Sidotopo ini dilakukan pembentukan dari Tim Pokja 8 fungsi keluarga tersebut yang terdapat (SOP) beserta Surat Keputusan Camat, bahwa kegiatan Kampung KB ini tidak ilegal dan sudah memiliki struktur organisasi yang tertulis.
5. Penyelenggaraan Program Kampung KB di Kelurahan Sidotopo sudah terimplementasi namun belum optimal. Hal ini dikarenakan pada faktor komunikasi sudah terimplementasi dengan adanya pencanangan dari Walikota Surabaya terkait Program Kampung KB di Sidotopo dengan diadakan penyuluhan sosialisasi kepada masyarakat RW 12. Selain itu sumber daya masih belum optimal karena tidak adanya pedoman peraturan daerah yang khusus diterapkan di Surabaya tentang penyelenggaraan Program Kampung KB dan kendala terhadap fasilitas dalam dana untuk kegiatan sosialisasi. Adapun faktor disposisi yang sudah terimplementasi karena sikap pelaksana yang selalu aktif dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat guna meningkatkan ketanggapan renspons masyarakat untuk ikut ber-KB. Dan untuk faktor struktur birokrasi sudah memiliki *Standart Operating Procedur* (SOP) dan struktur organisasi secara tertulis (legal) bagi Tim Pokja Kampung KB Sidotopo Kota Surbaya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan dalam penelitian ini, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk indikator disposisi atau sikap pelaksana sarannya yaitu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait Program Kampung KB terutama dalam hal pemikiran masyarakat yang belum modern dan sikap masyarakat yang belum bisa menerima adanya Program KB ini.
2. Untuk indikator sumberdaya dalam fasilitas diperlukan penambahan dana dari pemerintah untuk menjalankan setiap kegiatan sosialisasi yang dilakukan untuk kebutuhan konsumsi masyarakat.